

Peranan Partai Politik Islam Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

yenisrilestari@utu.ac.id

Fadhil Ilhamsyah, M. Si

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

fadhilhamisyah@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai keberadaan partai islam di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana partai ini mengusung Islam sebagai ideologi partainya. Sebagaimana secara luas diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam namun, perolehan suara dan kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam masih dibawah rata-rata. Kajian ini penting untuk diperdalam karena banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, kajian ini berupaya untuk menggali lebih dalam tantangan partai Islam di Indonesia. Hasil penelitian mendapati bahwa partai Islam di Indonesia belum sepenuhnya menjadi role bagi pelaksanaan nilai Islam yang sesungguhnya karena masih banyak dijumpai penyalahgunaan jabatan dan tindakan yang turut melibatkan kader dari partai Islam.

Keyword: peranan; partai politik; islam; pemerintahan.

1. PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 setelah jatuhnya kekuasaan Soeharto memberikan perubahan yang besar bagi tegaknya demokrasi yang sesungguhnya. Kepemimpinan Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada era reformasi ini membuka kebebasan yang seluas-luasnya bagi penduduk Indonesia terutama dalam dua aspek yang ketika orde lama dan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto sangat tertutup dan tidak dapat diganggu oleh campur tangan masyarakat Indonesia, yaitu kebebasan pers dan pembentukan organisasi terutama partai politik yang berideologikan islam.

Tahun 1985 di bawah rezim orde baru, Soeharto mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Hal ini menyebabkan partai-partai islam yang ada pada masa itu menjadi berang terhadap kepemimpinan Soeharto yang membatasi kebebasan masyarakat dalam menentukan sendiri ideologi apa yang akan menjadi dasar dari sebuah organisasi yang akan dibentuk. Partai-partai islam pada masa awal kemerdekaan adalah Partai Masyumi dan Partai Nahdatul Ulama (PNU) yang pada tahun 1955 muncul sebagai 4 partai politik besar di Indonesia bersama Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pemilu selanjutnya pada 1971 diikuti oleh 4 partai Islam yaitu PSII, NU, Parmusi dan Perti, jumlah total perolehan kursi partai Islam adalah 96 kursi dari 362 kursi DPR yang diperebutkan atau sebesar 26,5%. Partai Islam semakin pudar dengan perolehan suara yang terus menurun yaitu pada pemilu 1997 hanya memperoleh 27,5 5 % kursi dari 360 kursi di DPR, Pemilu 1982 memperoleh 26,1 % dari 360 kursi di DPR, Pemilu 1987 memperoleh 15,25 % dari 400 kursi di DPR, Pemilu 1992 memperoleh 15 % dari 400 kursi, dan pada Pemilu terakhir rezim orde baru tahun 1997 memperoleh 16 % kursi di DPR.

Rutuhnya rezim Soeharto memberikan keleluasaan bagi tokoh-tokoh Indonesia dalam mendirikan partai politik Islam, maka di Indonesia lahirlah 2 macam bentuk partai politik

Islam, yaitu pertama ialah partai politik yang secara tegas mencantumkan asasnya adalah Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdatul Ulama (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Kedua ialah partai yang berbasiskan massa Islam, iaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pemilu pertama pada rezim reformasi dilakukan pada 1999 dimana perolehan suara partai islam sangatlah kecil dibandingkan dengan perolehan suara partai politik yang tidak berdasarkan Islam. PPP hanya memperoleh 58 kursi di DPR iaitu 12,6 % dari 462 kursi, PBB 2 % (13 kursi), PK 1,5 % (7 kursi), PNU 1 % (5 kursi) serta PKU, PSII dan partai Masyui hanya memperoleh 1 kursi di DPR. Sedangkan perolehan suara partai yang berbasiskan assa islam juga sangat kecil, iaitu PKB 11 % (51 kursi) dan PAN 7,36 % (34 kursi), sehingga pada pemilu 1999 total perolehan kursi partai Islam adalah 37 % (171 kursi).

Perolehan suara partai politik islam di Indonesia yang semakin merosot menunjukkan bahwa partai politik islam tidak terlalu mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia, namun perkembangan partai politik Islam yang terus terbentuk dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa partai politik islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Walaupun jumlah total perolehan suara partai politik Islam selalu menurun dibandingkan dengan tahun 1955 iaitu sebesar 43,7 % turun pada pemilu 1999 iaitu 36,8 % dan pada pemilu 2008 naik menjadi 38,1%.

Indonesia sebagai sebuah negara Islam terbesar di dunia belum memberikan bagi berjayanya partai politik islam di Indonesia, banyak berdirinya partai politik yang berasakan islam di Indonesia merupakan suatu perkembangan yang cukup baik, namun dengan kecilnya perolehan suara partai poltik islam dalam setia pemilu di Indonesia menjadi sebuah persoalan, mengapa hal ini dapat terjadi. Walaupun dengan perolehan suara yang sangat kecil dibandingkan dengan perolehan suara partai yang berideologikan nasionalisme, partai Islam memberikan pengaruh dan memiliki peranan tersendiri dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai partai politik Islam bukanlah hal yang baru. Banyak dijumpai berbagai literatur hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan skop kajian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian tersebut dijadikan sebagai referensi yang digunakan untuk memetakan kembali persoalan yang berkaitan dengan peranan partai Islam dalam pemerintahan di Indonesia, antara lain:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gonda Yumitro dengan judul *Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2013 di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 17, Nomor 1, Juli 2013 (35-50). Artikel ini membahas mengenai turunnya perolehan suara partai Islam di Indonesia disebabkan faktor demokrasi, sejarah, kompetensi partai Islam dan faktor eksternal.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lili Romli dengan judul *Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia* yang diterbitkan pada jurnal Penelitian Politik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2004: 29-48. Kajian ini membahas mengenai kemunculan partai Islam pasca reformasi yang dianggap dapat menguat namun didapati perpecahan dalam partai Islam tersebut akibat fragmentasi dalam tubuh partai itu sendiri serta kurang tertariknya minat masyarakat terhadap partai Islam semakin menambah panjang tantangan dari keberadaan partai Islam itu sendiri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riva'i A. R. Dani dengan Judul *Peran Partai Politik Islam Dalam Proses Legislasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Masa Pemerintahan B. J. Habibie)* merupakan Skripsi

Sarjana Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pada Tahun 2018. Kajian ini mendapati bahwa partai politik Islam pada masa Habibie mengalami dinamika yang sangat beragam karena adanya perampangan kuota partai politik pada masa tersebut, namun begitu partai islam masih memainkan peran penting dalam legislatif terutama sebagai pembuat kebijakan mengenai ibadah haji.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu yang ada dalam masyarakat. seluruh data dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran literatur maupun studi pustaka dari buku, artikel, website dan sumber lainnya.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

PKS merupakan salah satu partai islam yang menjadi pendukung partai pemerintah saat ini, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menetapkan pelbagai polisi awam dikeranakan PKS merupakan partai koalisi dengan partai demokrat yang merupakan partai dengan suara majoriti di parlimen Indonesia. Penduduk Indonesia yang majoritinya beragamakan islam melihat PKS sebagai partai islam terkuat saat ini di Indonesia, sebagai partai islam besar yang memiliki pengaruh dalam sistem pemerintahan di Indonesia, PKS memiliki peranan yang sangat besar dalam pemerintahan Indonesia saat ini.

Tabel 1.

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pilihan raya legislatif Indonesia pada tahun 1999, 2004 dan 2009.

Tahun	Suara	%	Kursi	%	+/-
1999	1,436,565	1.36	7	1.51	n/a
2004	8,325,020	7.34	45	8.18	+38
2009	8,204,946	7.88	57	10.18	+12

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.

PKS sebagai sesebuah partai islam yang besar di Indonesia memiliki peranan yang sangat dominan juga dalam parlimen dan pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikeranakan, sebagai salah satu partai islam yang memilik banyak anggota baik yang berada dalam negara Indonesia maupun yang berada di luar negara memiliki sistem kaderisasi serta hubungan yang kuat di antara kader-kader partai untuk terus mengamati setiap isu yang ada di Indonesia serta berupaya untuk turut serta dalam menyelesaikan pelbagai isu yang ada tersebut.

Dalam konstitusi Indonesia partai politik memiliki peranan dalam pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik yang berdesarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Republik Indonesia. PKS sebagai salah satu partai politik di Indonesia juga harus menjalankan peranannya sebagai partai politik sesuai dengan aturan yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia tersebut.

Salah satu peranan dari partai politik ialah sebagai sarana komunikasi politik. Menurut Sigmund dikutip dari Mirriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam msyarakat politik yang luas (Budiardjo, 2008). PKS sebagai sebuah partai islam haruslah mengadakan komunikasi politik kepada rakyat mengenai pelbagai macam isu yang

sedang terjadi di dalam pemerintahan. Hal ini dikeranakan sebagai sebuah partai islam, PKS haruslah mengadakan komunikasi yang baik kepada masyarakat untuk memperluas lagi pengaruh ideologi partai serta untuk memperoleh sokongan yang lebih besar lagi daripada masyarakat Indonesia.

Komunikasi politik selain digunakan untuk memperluas pengaruh sesebuah partai juga dapat digunakan untuk menyebarkan sebuah kebijakan partai yang terdapat dalam sebuah pemerintahan. Sebagai contohnya, PKS sebagai partai yang memiliki komitmen terhadap perlindungan wanita dan anak yang dibentuk oleh Gabenor Sumatera Barat yang merupakan seorang gabenor daripada PKS telah memperoleh penghargaan daripada pemerintah Indonesia, dikeranakan program perlindungan wanita dan anak tersebut telah berjaya dilaksanakan di daerah kekuasaannya kerana terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah yang dipimpin PKS dengan kaum wanita dan anak di Sumatera Barat.

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yakni mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik (Koirudin, 2004). Gabenor Sumatera Barat yang merupakan kader pimpinan daripada PKS dalam mewujudkan program kerjanya terhadap perlindungan wanita dan anak memiliki komunikasi politik yang terstruktur, dalam hal ini ialah dengan menyusun agenda politik yang berkonsep untuk membangun komunikasi politik yang baik antara wanita dan anak dengan kakitangan pemerintahan Gabenor Sumatera Barat. Terutama mengenai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sumatera Barat yang harus berbasiskan gender serta meningkatkan anggaran terhadap pemberdayaan wanita dan anak dalam bidang kesehatan, pendidikan, ibu dan anak, serta ekonomi. Adanya komunikasi politik yang terstruktur melalui pelbagai program kerja tersebut telah memberikan keberjayaan terhadap Pemerintahan Gabenor Sumatera Barat dalam mencapai komitmen terhadap pemberdayaan wanita dan anak.

partai politik memiliki peranan sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Proses untuk mengolah dan kemudian merumuskan pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk tuntutan dan dukungan, dinamakan artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan ini tidak hanya dijalankan partai politik, tetapi artikulasi kepentingan juga dapat dijalankan oleh kelompok kepentingan (Haryanto, 1982).

Anggota partai politik yang memiliki kedudukan dalam lembaga perwakilan rakyat harus mampu untuk mengolah dan kemudian merumuskan pendapat, aspirasi maupun tuntutan masyarakat yang berasal dari daerah pemilihan anggota wakil rakyat tersebut yang kemudian disimpulkan secara garis besar untuk disampaikan kepada pemerintah dalam pelbagai bentuk, apakah dalam bentuk sokongan maupun dukungan. Masyarakat sebuah daerah yang telah memilih wakil rakyat melalui pilihan raya legislatif yang telah diadakan tentunya memiliki sebuah harapan bahawa wakil rakyat yang dipilih tersebut benar-benar merupakan wakil rakyat di lembaga parlimen untuk menyampaikan segala aspirasi masyarakat.

Upaya PKS dalam menjalankan peranannya sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan ialah melalui Fraksi partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengarahkan Rancangan Undang-undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) haruslah dapat digunakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan hasil daripada kerja reses, iaitu dimana setiap anggotan wakil rakyat turun ke daerah pilihannya masing-masing untuk mengumpulkan pelbagai informasi mengenai pelbagai kebutuhan masyarakat yang akan dipertimbangkan dalam prioritas penyusunan APBN setiap tahunnya, hal ini dilakukan untuk mencapai sebuah hasil penyaluran kewangan pemerintahan yang tepat sasaran bagi

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, PKS lebih menitikberatkan kepada anggaran pendidikan serta pembangunan sarana transportasi massal yang terintegrasi baik seperti kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang.

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng-*input*-an berbagai keperluan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik (Koirudin, 2004). Namun, kadang kala artikulasi kepentingan dari sebuah partai politik yang duduk di parlimen digunakan tidak hanya untuk mencapai keperluan masyarakat saja, tetapi sering kali setiap anggota parlimen lebih mendahulukan kepentingan partai yang mereka sokong dalam menetapkan sebuah polisi yang akan dimuat dalam kebijakan publik sebuah negara.

Pada dasarnya, setiap anggota partai yang memiliki kedudukan dalam parlimen tentunya memiliki sebuah kepentingan yang besar bagi menjaga kepentingan partai yang disokongnya. Hal ini berlaku pada mana-mana partai di seluruh dunia ini, bagi anggota partai, kepentingan kelompok partainya ialah hal yang harus diutamakan daripada kepentingan lainnya termasuk rakyat yang telah memilihnya, hal ini dikeranakan tuntutan daripada partai itu sendiri maupun keinginan anggotanya masing-masing tidak terkecuali PKS. Sebagai partai islam yang memiliki kedudukan di parlimen, PKS tidak mahu untuk berkoalisi dengan partai islam lainnya, dimana perolehan suara partai islam yang lainnya tidaklah besar, namun PKS di parlimen lebih memilih untuk berkoalisi dengan partai nasional yang memiliki perolehan suara yang besar untuk menjaga kepentingan politik PKS di parlimen terutama dalam kebijakan publik.

Koalisi dengan partai islam lainnya yang merupakan sesebuah partai dengan ideologi yang sama, bukanlah merupakan pilihan daripada PKS untuk menjaga kepentingan partainya dalam parlimen. Namun, PKS lebih memilih berkoalisi dengan partai besar yang adalah partai nasionalis untuk tetap menjaga kepentingan partainya dalam parlimen kerana dengan perolehan suara yang besar dalam parlimen, partai nasionalis akan mendapatkan suara 2/3 dalam setiap keputusan yang diambil secara voting. Sehingga hal ini merupakan salah satu artikulasi kepentingan yang dilakukan PKS dalam parlimen dan juga kepada masyarakat yang telah memilihnya.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik (Koirudin, 2004). Pelbagai macam agregasi kepentingan daripada semua partai yang ada dalam parlimen yang merupakan perwujudan daripada kepentingan setiap partai yang ada haruslah digabungkan untuk mendapatkan kesimpulan yang alternatif bagi pembentukan sebuah kebijakan publik. Dalam hal ini, PKS lebih memilih untuk berkoalisi dengan partai nasional yang memiliki suara yang majoriti dalam parlimen adalah untuk mencapai sebuah kebijakan publik yang disokong pula dengan suara yang majoriti, sehingga kepentingan PKS dalam parlimen akan lebih berjaya apabila dibandingkan ketika PKS berkoalisi dengan partai islam lainnya yang memiliki suara yang minoriti di parlimen.

Peranan partai politik selanjutnya dalam pemerintahan ialah sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik disamping menanamkan ideologi partai kepada para pendukungnya, harus pula mengajarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan politik yang berlaku di masyarakatnya atau di negaranya. Partai politik haruslah mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dan lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingannya sendiri atau golongan (Haryanto, 1982).

PKS sebagai sebuah partai islam memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peranannya sebagai sarana sosialisasi politik terhadap masyarakat Indonesia. Sosialisasi

politik ini dapat dilakukan melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pelbagai proses politik yang baik dalam keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sama ada itu pemilihan raya, pemberian pendapat kepada pemimpin dan banyak lagi.

Sosialisai politik adalah untuk mengajarkan nilai-nilai, keyakinan politik yang berlaku dalam sebuah negara bangsa, dimana nilai dan keyakinan itu adalah sebuah ideologi dasar yang menjadi pedoman bagi sesebuah parti. Sebagai contoh, PKS sebagai sebuah parti islam, sangat mengharamkan penggunaan dadah atau obat-obat narkotika yang terlarang, dengan demikian, PKS bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan sosialisasi 21 jenis dadah baharu kepada semua kalangan masyarakat terutama kepada pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat penggunaan dadah dan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai jenis baru dadah yang banyak tersebar di masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, PKS berharap dapat membentuk sebuah masyarakat terutama pemuda dan pemudi yang lebih menghargai kehidupan dan kesihatannya dengan pelbagai hal yang positif dengan menjahui pelbagai macam jenis dadah yang dapat menghancurkan kehidupan sebuah bangsa. PKS melalui sosialisasi ini menekankan kepada pentingnya kegiatan positif seperti keikutsertaan pemuda dan pemudi dalam sesebuah organisasi yang mampu meningkatkan kemampuan pemuda dan pemudi dalam mengeluarkan pendapat atau membentuk sebuah wadah yang mampu menampung pelbagai persoalan yang menjadi isu baik isu dalam negeri atau isu internasional yang memerlukan jalan keluar atau solusi, baik yang bersifat keagamaan, ekonomi maupun politik.

Sebagai contoh beberapa organisasi dibawah pemerintahan PKS adalah seperti Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), *Central for Indonesia Reform* (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), *Institute for Economic Studies* (INFES), *Institute of Students and Youth for Democracy* (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS). Sehingga pemuda dan pemudi atau semua kalangan masyarakat di Indonesia dapat lebih aktif dalam pelbagai organisasi yang positif melalui pelbagai organisasi yang telah ditubuhkan PKS ini termasuk untuk menjahui penggunaan dadah.

Sosialisai politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara (Koirudin, 2004). Melalui sosialisasi politik ini, PKS juga dapat memperkenalkan nilai, sikap dan etika politik yang dianut oleh PKS sebagai sebuah parti islam melalui pelbagai wujud keorganisasian yang ditubuhkan oleh PKS, sehingga melalui sosialisasi politik ini, PKS dapat membentuk masyarakat Indonesia yang lebih kaya akan nilai, sikap dan etika Islam dalam membentuk ideologi islam sebagai dasar dalam berpolitik.

Selanjutnya, peranan PKS sebagai sebuah parti politik ialah sebagai sarana rekrutmen politik. Parti politik dalam peranannya sebagai sarana rekrutmen politik adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota parti Parti politik berusaha untuk menarik minat warga negara agar bersedia menjadi anggota parti. Sehubungan dengan hal itu parti politik turut serta memperluas partisipasi warga negara di bidang politik. Rekrutmen politik ini merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota-anggota parti yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin (Haryanto, 1982).

Sistem rekrutmen yang dilakukan oleh PKS sebagai parti islam ialah didasarkan pada organisasi-organisasi islam yang ditubuhkan oleh PKS melalui pelbagai forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir oleh PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (kelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah*

(pelatihan intelektual) dan *nadwah* (seminar). Melalui pelbagai forum tersebut, PKS memperbesar peluangnya untuk mendapatkan kader baru.

Dari pelbagai forum tersebut, PKS menyebarkan konsep dan ideologi PKS sebagai sebuah partai Islam terhadap masyarakat yang berminat terhadap konsep dan ideologi PKS sebagai sebuah partai politik. Dalam rekrutmen politik ini, selain menarik kader untuk partai PKS juga memberikan peluang partisipasi terhadap masyarakat dalam proses politik melalui pelbagai kegiatan untuk memilih anggota dan pemimpin dari organisasi yang terkecil dahulu untuk tingkat selanjutnya ikut dalam pemilihan raya yang lebih besar.

Sebagai contoh, peranan PKS sebagai sarana rekrutmen politik di Indonesia ialah di universiti-universiti di pelbagai daerah di Indonesia melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK) merupakan sebuah organisasi yang sangat populer bagi perekrutan mahasiswa dan mahasiswi sebagai kader PKS. Secara eksplisit organisasi ini merupakan lembaga kajian keagamaan yang ada di setiap tingkatan universiti, dimulai dari tingkat program, fakulti hingga universiti, namun setelah menyelesaikan studi di universiti anggota LDK ini memiliki jaringan yang lebih luas untuk secara aktif ikut serta dalam keorganisasian PKS sebagai sebuah partai politik.

Peranan partai politik yang selanjutnya ialah sebagai sarana pembuat kebijakan (polisi). Partai politik dapat dikatakan sebagai sarana pembuat kebijaksanaan atau apabila partai politik tersebut memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan secara majoriti. Apabila partai tersebut hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, maka partai tersebut tidak merupakan sarana pembuatan kebijaksanaan akan tetapi sebagai pengkritik kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah (Haryanto, 1982).

Selama masa pemerintahan di Indonesia, partai PKS merupakan partai koalisi dengan partai nasional lainnya yang memiliki suara majoriti dalam parlimen, sehingga PKS merupakan salah satu partai yang ikut serta dalam pembuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam sebuah sistem pemerintahan negara-negara di dunia, pembuat kebijakan merupakan sebuah stakeholder dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang dibuat terkadang mengandungi pelbagai kepentingan kelompok partai di dalamnya.

PKS sebagai sarana pembuat kebijakan dapat dilihat melalui sokongan PKS terhadap penyetujuan revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, dimana salah satu isi daripada UU ini ialah untuk menghindari seorang presiden dan wakil presiden rangkap jabatan menjadi ketua umum partai politik. PKS turut serta menyokong kebijakan ini dikeranakan PKS menilai bahawa dalam perkembangan demokrasi yang berjalan di Indonesia banyak calon presiden merasa “besar” dan menghadirkan pengaruh yang tidak sebanding di publik dengan calon lain.

Peranan terakhir daripada sebuah partai politik ialah sebagai saran pengatur konflik. Di negara-negara yang menganut paham demokratis perbedaan pendapat dan persaingan di antara para warga negara atau golongan-golongan yang ada memang sering muncul. Perbedaan pendapat dan persaingan tersebut sering sekali mengakibatkan konflik-konflik atau pertentangan-pertentangan antara mereka, disinilah fungsi partai politik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam hal ini partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat, persaingan atau bahkan konflik-konflik yang terjadi, sehingga akibat yang di timbulkannya tidak akan merusak integrasi nasional yang telah dibinanya (Haryanto, 1982).

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang memiliki sebuah kebudayaan, ras, bahasa dan agama yang sangat majemuk memiliki potensi besar dalam terjadinya konflik yang diakibatkan oleh pelbagai macam perbedaan paham maupun golongan. Sebagai contoh, konflik keagamaan yang terjadi antara organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan aliran Ahmadiyah (sebuah aliran yang dinyatakan sesat kerana menggabungkan kelima prinsip agama iaitu Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Islam) sebagai sebuah partai Islam PKS

harus memiliki tindakan tegas bagi menangani permasalahan ini, baik dengan cara mengeluarkan kebijakan ataupun menjadi mediator dalam penyelesaian konflik ini, tetapi pada kenyataannya PKS tidak melakukan hal besar dalam menyelesaikan konflik ini, melainkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram bagi ajaran Ahmadiyah ini, yang kemudian dapat mengurangi sedikit konflik yang terjadi antara umat Islam Indonesia yang diwakili oleh FPI dengan pemimpin Ahmadiyah.

PKS harus mampu untuk menyelesaikan atau terlibat aktif sebagai sebuah mediator dalam penyelesaian berbagai permasalahan keagamaan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan PKS adalah salah satu partai Islam yang memiliki kedudukan dalam parlemen, sehingga melalui kedudukan ini PKS mampu untuk menjalankan peranannya secara lebih baik lagi untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik yang berlandaskan dengan asas dan prinsip ajaran Islam

5. KESIMPULAN

Partai Islam di Indonesia adalah sebuah partai yang sangat berkembang dalam konsep kebebasannya membentuk sebuah partai yang berideologikan Islam. Banyaknya partai Islam yang ada di Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai sebuah partai Islam yang besar dalam pemerintahan, PKS harus mampu untuk meningkatkan nilai dan prinsip ajaran Islam yang sebenarnya dalam pemerintahan termasuk dalam menjalankan peranannya sebagai sebuah partai politik. Partai Islam di Indonesia memang berkembang sangat subur, namun perolehan suara partai Islam dengan partai lainnya yang berideologi lain sangatlah kecil, hal ini dikarenakan banyaknya partai Islam yang ada namun tidak begitu banyak membawa perubahan dalam partai Islam itu sendiri. Sebagai contoh, masih banyaknya anggota partai Islam yang terlibat dalam kasus rasuah serta perpecahan dalam tubuh partai Islam sendiri merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi partai Islam di Indonesia dalam melaksanakan peranannya sebagai sebuah partai dalam pemerintahan di Indonesia.

Peranan partai Islam dalam pemerintahan di Indonesia secara garis besar dapat dikatakan masih memiliki pengaruh namun tidak dominan, tetapi partai Islam di Indonesia masih sangat aktif dalam memperjuangkan ideologi partainya, namun kesadaran publik yang tidak lagi membedakan antara partai nasionalis dengan partai keagamaan secara langsung, dimana masyarakat Indonesia menilai bahwa partai nasionalis juga mengakomodasikan simbol dan identitas keagamaan serta partai Islam dalam era demokrasi politik ini menghadapi tantangan moral politik yang lebih daripada partai lain, yaitu simbol keagamaan yang dibawa oleh partai Islam telah gagal dibuktikan dalam sistem dan etika politik partai Islam seperti adanya kasus rasuah dan perpecahan dalam tubuh partai Islam itu sendiri.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dan, Nimmo. 2006. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gonda Yumitro. 2013. *Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 17, Nomor 1, Juli 2013 (35-50).
- Haryanto, 1982, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lili Romli. 2004. *Partai Islam dan Pemilu Islam di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2004: 29-48.
- Macridis, Roy C. dan Bernard E. Brown. 1996. *Perbandingan Politik*. Jakarta: Erlangga.

-
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (ed) Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhtadi, Burhanuddin (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Musda Mulia, *Negara Islam – Pemikiran Politik Husain Haikal*, Disertasi Doktor, Program Parca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1997.
- Riva'i A. R. Dani. 2018. *Peran Partai Politik Islam Dalam Proses Legislasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Masa Pemerintahan B. J. Habibie)*. Skripsi. Medan: Universitas Negeri Islam Medan.
- Yusul Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Terjemahan dari Judul Aslinya: *As-Siyasah Asy-Syari'yah*, oleh Kathur Suhadi, Pustaka Al Kautsar, Cet.I, Jakarta, 1999.
- Yusuf Al-Qardhawy, 2008, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik-Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme*, Jakarta: Darus Syuruq.